

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak menjadi akhir perjuangan dalam menghadapi ancaman bangsa lain. Melainkan periode awal kemerdekaan yang menandai masuknya Indonesia ke masa yang baru yaitu masa Perang Kemerdekaan 1945-1949 atau disebut Revolusi Fisik yakni periode penuh gejolak, ledakan kekerasan, konflik sosial, perjuangan politik, dan segala sesuatu yang menimbulkan krisis politik yang membawa distintegrasi orde sosial lama serta merombak struktur kekuasaannya sehingga akhirnya melahirkan orde sosial politik baru.¹

Pada periode ini seluruh bangsa ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraihinya lewat serangkaian perjuangan yang panjang dari berbagai macam ancaman yang ada, terutama ancaman dari pihak Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia bahkan ingin menguasainya kembali. Hal ini dibuktikan dengan serangan Belanda yang pertama pada 21 Juli 1947.

Pada masa ini masing-masing daerah di Indonesia mengalami dampaknya, terutama wilayah yang dianggap penting salah satunya adalah Yogyakarta yang pada tanggal 4 Januari 1946 resmi dijadikan ibu kota negara. Penetapan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia menunjukkan bahwa para pejuang Yogyakarta dianggap yang paling tepat untuk diberi tanggung jawab mempertahankan kemerdekaan.

¹Tashadi (dkk), *Keterlibatan Ulama DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Depdiknas, 2000), hlm.136.

Belanda menganggap dengan menguasai Yogyakarta maka Indonesia keseluruhan akan mudah untuk dikuasai. Oleh karena itu, Yogyakarta menjadi sasaran utama bagi pihak Belanda untuk mencapai maksudnya menguasai kembali bangsa Indonesia. Kondisi negara yang semakin kacau membuat peran serta rakyat sangat diperlukan untuk berjuang bersama melawan serangan dari bangsa lain. Militer Indonesia mencanangkan adanya perang total, artinya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Adanya peran serta rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan masa perang kemerdekaan merupakan sebuah kekuatan tangguh yang dimiliki Indonesia dengan mengutamakan nilai persatuan.

Adanya serangan dari bangsa lain dan terancamnya kemerdekaan Indonesia mengundang keprihatinan dari berbagai lapisan masyarakat untuk ikut membela tanah air. Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas agamanya adalah Islam maka ulama mempunyai peranan penting, paling tidak mampu menggerakkan umat dan rakyatnya tergabung dalam laskar-laskar rakyat yang dengan penuh semangat melakukan perlawanan terhadap penjajah.²

Keterlibatan mereka khususnya dalam periode perang kemerdekaan (1945-1949) disamping secara langsung di dalam berbagai pertempuran sehingga banyak yang gugur sebagai syuhada juga mereka memberi bekal do'a, petunjuk, nasehat kepada para pejuang, dengan begitu mampu memantapkan tekad dan mengobarkan semangat perjuangan dalam medan pertempuran. Kaum ulama dianggap sebagai tokoh kharismatik yang dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut serta melawan Imperialisme Belanda maupun gangguan keamanan dari

²*Ibid.*, hlm. 27.

oknum bangsa Indonesia sendiri dan memberi pengaruh yang besar termasuk berjuang membela tanah air dari rongrongan penjajah. Hal ini tidak lepas dari berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh seorang ulama, sehingga mereka memiliki peran yang cukup dominan dan efektif dalam mempersatukan kelompok-kelompok di dalam masyarakat serta memiliki nilai ganda. Di samping mengandung nilai kepahlawanan juga mengandung nilai-nilai luhur yang perlu diteladani seperti misalnya gotong-royong, nilai persatuan dan kesatuan, nilai rela berkorban tanpa pamrih dan sebagainya.

Ulama sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat yang dimiliki oleh Yogyakarta pada saat itu untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi memperjuangkan kemerdekaan bangsa, baik dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Adapun cara langsung dilakukan dengan membentuk laskar perjuangan rakyat berbasis islam yakni dengan didirikannya Hizbullah dan juga Askar Perang Sabil (APS) di Yogyakarta dan cara tidak langsung dengan melakukan pengajian dan berodoa pada Allah SWT agar Indonesia diberikan kemerdekaan yang mutlak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Islam dan ulama banyak tergabung dalam organisasi maupun badan politik Islam. Khususnya di Yogyakarta yang pada awal kemerdekaan sudah muncul tokoh-tokoh muslim yang besar pengaruhnya tidak hanya bagi kepentingan agama namun juga kepentingan nasional. Berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah³ pada tanggal

³Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh KH . Ahmad Dahlan di Yogyakarta, organisasi ini difokuskan pada bidang pendidikan dan bidang sosial.

12 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu contoh lahirnya Islam sebagai gerakan modernis. Dalam perkembangannya, di Yogyakarta berdiri pula partai politik Islam Masyumi⁴ yang sebagian anggotanya adalah orang Muhammadiyah.

Hal ini didorong oleh kondisi negara yang eksistensinya semakin terancam oleh serangan Belanda dan juga sekutu, karena hal itu timbul kesadaran dalam jiwa para ulama untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya dengan tergabung dalam satu wadah perjuangan politik Islam, untuk mengatur strategi dan menyusun kekuatan politik. Tetapi selain kekuatan politik, Indonesia pada saat itu juga memerlukan kekuatan militer yang tangguh.

Pada awal tahun 1946 Masyumi cabang Yogyakarta, mengusulkan pada pihak pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengizinkan terbentuknya organisasi semi militer guna membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mempertahankan kemerdekaan. Organisasi semi militer yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu kesatuan pejuang umat Islam yang sengaja dibentuk dan bertindak sebagai kekuatan militer.

Bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1367 H, diadakan musyawarah yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo, diawali sholat *lail* dan *Itikaf* bermunajat kepada Allah SWT di masjid Taqwa suronatan Yogyakarta. Hasil dari pertemuan tersebut berdasarkan musyawarah ini akhirnya diputuskan untuk membentuk badan kelaskaran di bawah pimpinan para ulama dengan nama Angkatan Perang

⁴Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang merupakan partai politik Islam yang berdiri tanggal 7-8 November 1945 berawal dari sebuah kongres bertempat tinggal di gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Yogyakarta.

Sabil, namun kemudian diubah menjadi Askar Perang Sabil (APS) agar tidak terjadi kekacauan dalam bentuk kesatuan yang ada dalam TNI, karena di dalam menjalankan tugasnya APS selalu berada di bawah komando TNI.

Kata Askar mempunyai persamaan makna dengan laskar yang sejak awal terbentuknya memang telah ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap apapun yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga merupakan wadah perjuangan bagi pemuda-pemuda Islam di daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang berasal dari pemuda-pemuda Islam bekas anggota Hizbullah⁵ maupun dari rakyat pada umumnya.

Setelah musyawarah tersebut para ulama mengutus Ki Bagus Hadikusumo⁶, K.H Mahfudz Siradj dan K.H. Ahmad Badawi untuk menyampaikan kebulatan tekad ulama Yogyakarta dihadapan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pada saat itu menjabat pula sebagai menteri pertahanan. Hal ini disambut baik oleh beliau dengan mengeluarkan surat persetujuan (Serat Kekantjingan)⁷ dan memberikan doa restunya, kemudian beliau menyuruh untuk menghadap

⁵Hizbullah merupakan pasukan pejuang Islam yang resmi dibentuk pada tanggal 14 September 1944 di Jakarta atas permohonan Masyumi kepada pihak militer Jepang. Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. (Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1996), hlm.19.

⁶Ki Bagus Hadikusumo pada saat itu juga menjabat sebagai Ketua PP. Muhammadiyah. Djarnawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perdjoeangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, (Yogyakarta: Persatuan, 1979), hlm. 39.

⁷Serat kekancingan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai bentuk restunya kepada para ulama yang telah membentuk MUAPS-APS. Lihat lampiran 2 “Salinan Serat Kekancingan”, hlm. 116.

Panglima Besar Jenderal Sudirman guna memberikan persetujuannya. Ternyata beliau pun menyambut baik gagasan tersebut dengan senang hati dan akan memberi pelatihan kepada anggota Askar Perang Sabil. Setelah dibentuk pada tanggal 23 Juli 1947 secara resmi didirikan pula Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) yang merupakan wadah bagi organisasi pemimpinnya, maka sudah jelas bahwa APS bukan hanya sekedar kumpulan orang yang siap berperang di medan pertempuran, melainkan sebuah kelaskaran yang terorganisir dengan baik.

Sebagai organisasi semi militer, APS memerlukan pelatihan fisik yang dilaksanakan di alun-alun utara Yogyakarta. Atas perintah dari MUAPS⁸ pusat para anggota APS diterjunkan ke front-front perjuangan untuk bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada perkembangannya pelatihan militer diadakan di setiap kecamatan sebelum mereka diberangkatkan ke medan pertempuran. Pada peristiwa Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember kolonial Belanda mulai menduduki Yogyakarta, untuk menguasai kembali Indonesia. Belanda melakukan pemboman lapangan udara Maguwo dan bangunan penting lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penerjunan 900 pasukan payung dan pasukan-pasukan lain.⁹ Pada peristiwa ini para pemimpin Republik berhasil tertangkap oleh pasukan Belanda.¹⁰ Pada saat itu APS ikut berjuang

⁸ Lihat lampiran 1 “Struktur Organisasi MUAPS” hlm. 115

⁹G.Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20 2 Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988) , hlm. 42.

¹⁰M.C, Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*,(Jakarta:Serambi, 2005), hlm.426.

mempertahankan kemerdekaan bersama TNI dan laskar perjuangan lainnya dengan melakukan strategi perang yang berlandaskan Islam. Dalam perkembangannya APS ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan terlibat dalam pertempuran di berbagai wilayah di Yogyakarta.

Pada masa Perang Kemerdekaan, Belanda melancarkan serangannya untuk menjajah kembali Indonesia baik secara militer maupun politik. Namun selama itu pula rakyat Indonesia terus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah. Selama empat tahun lebih, Masyumi bersama golongan lain memusatkan perhatian pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang masih dirongrong keinginan Belanda untuk kembali meneruskan penjajahan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan baru berakhir pada Desember 1949, setelah perjanjian KMB (Konferensi Meja Mundar) ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda di Den Haag.¹¹

Sebagai bentuk penghargaan kepada para anggota APS yang meninggal di medan pertempuran maka tepat di depan balai Rukun Warga (RW) Kauman Darussalam didirikan sebuah monumen¹² bertuliskan *syuhada fi sabilillah* dan di masa selanjutnya dibangun pula monumen peresmian *syuhada fi sabilillah* yang bertuliskan tanggal peresmian pada 20 Agustus 1995.¹³ Monumen ini didirikan

¹¹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

¹²*Syuhada fi sabilillah* artinya meninggal di jalan Allah, orang yang meninggal ketika di medan pertempuran untuk membela kebenaran dan berpegang teguh terhadap nilai Islam. Lihat lampiran 4 “Foto Monumen Syuhada Fii Sabilillah”, hlm. 118.

¹³Lihat lampiran 5 “Foto Peresmian Monumen Fii Sabilillah”, hlm. 119.

untuk mengenang 24 nama anggota APS yang meninggal saat berperang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan, Masjid Gede Kauman kerap digunakan sebagai markas untuk mengatur strategi demi meraih kemerdekaan. Pejuang-pejuang Islam sangat berperan dalam hal ini. Terbentuknya Askar Perang Sabil (APS) di Kauman, yang dipimpin oleh Kyai Mahfudz, dengan personil yang juga merupakan ulama-ulama dan pejuang Islam mereka semua berjuang mempertahankan kemerdekaan di bawah komando TNI.

Selain dari pembahasan mengenai APS ini menarik untuk dikaji lebih dalam, karya sejarahnya belum banyak ditulis oleh sejarawan. Padahal peranan ulama dan militer Islam khususnya masa perang kemerdekaan sangat penting untuk memimpin perlawanan rakyat yang tergabung dalam wadah-wadah perjuangan yang bernafaskan *jihad fisabilillah*¹⁴ sehingga tidak dapat dikesampingkan dalam penulisan sejarah.

Adapun pertimbangan penulis dalam membuat penelitian mengenai Askar Perang Sabil adalah ketertarikan terhadap peranan militer Islam pada masa Perang Kemerdekaan, khususnya di Yogyakarta. Selain itu, penulisan mengenai APS masih sangat kurang padahal memiliki peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan di bawah komando TNI khususnya di Yogyakarta.

Penulis menginginkan karya sejarah mengenai militer Islam tidak hilang begitu saja serta ingin memperkaya khasanah penulisan sejarah bidang militer Islam. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian sejarah yang

¹⁴*Jihad fii sabilillah* secara harfiah berarti berperang di jalan Allah. Perjuangan yang didasarkan atas tuntunan (jalan) yang diridhai oleh Allah serta mencontoh pada keteladanan nabi Muhammad, Tashadi, (dkk), *op.cit.*, hlm. 28-29.

berjudul *Askar Perang Sabil (APS): Studi Politik dan Militer Religius Masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1945-1949*.

Pemilihan tahun 1945, meskipun APS resmi didirikan tahun 1947 namun embrio yang memberikan dasar dibentuknya APS berawal setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu Belanda bersama Sekutu datang ke Indonesia. Pada periode tersebut APS aktif memainkan peranannya sebagai kekuatan sosial yang bersifat religius dijiwai dengan semangat Islam.

Pasukan Askar Perang Sabil (APS) adalah para pejuang muslim yang tidak mengenal lelah dalam mempertahankan kemerdekaan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan laskar perjuangan yang lain. Bahkan sebelum Agresi Militer Belanda dilancarkan, APS pun telah aktif menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Sedangkan pemilihan tahun 1949 adalah tahun berakhirnya periode Perang Kemerdekaan di Indonesia yang ditandai dengan penarikan pasukan Belanda oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Politik Islam Masa Awal Kemerdekaan di Yogyakarta?
2. Bagaimana terbentuknya Askar Perang Sabil (APS) Yogyakarta?
3. Seperti apa keterlibatan Askar Perang Sabil (APS) dalam membantu TNI masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1945-1949?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jika dilihat secara umum tujuan penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan¹⁵. Tujuan dalam penelitian ini penulis membagi menjadi tujuan umum dan juga tujuan khusus, adapun tujuan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

- a. Dapat melatih kemampuan berfikir kritis, Belajar menghasilkan penulisan sejarah yang relevan dan berkualitas dengan penerapan metode penulisan sejarah kritis.
- b. Dapat memperkaya sumber sejarah mengenai topik yang diusung dalam penulisan sejarah serta melatih kemampuan merekonstruksi kejadian dimasa lampau dan menuangkannya dalam bentuk penulisan sejarah.
- c. Meningkatkan kemampuan analitis yang baik sehingga mampu menghasilkan karya sejarah yang objektif.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Politik Islam masa awal kemerdekaan di Yogyakarta.
- b. Mengetahui sejarah Askar Perang Sabil Yogyakarta.
- c. Memberikan penjelasan mengenai keterlibatan Askar Perang Sabil dalam berjuang membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) masa Perang Kemerdekaan.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta,2010), hlm.397.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini baik untuk penulis maupun pembaca adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra di Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Mengasah kemampuan analisis suatu permasalahan khususnya mengenai Askar Perang Sabil dalam sudut pandang politik, dan militer religius.
- c. Menjadi tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menganalisis suatu peristiwa sejarah.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan mengenai politik Islam masa awal kemerdekaan di Yogyakarta.
- b. Menambah wawasan mengenai terbentuknya Askar Perang Sabil.
- c. Menambah wawasan mengenai keterlibatan Askar Perang Sabil pada masa Perang Kemerdekaan di bawah komando TNI.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka sebagai landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁶ Kajian pustaka terdiri dari buku-buku dan hasil

¹⁶Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta:Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 6.

karya ilmiah sebagai rujukan agar karya yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah termasuk skripsi diperlukan suatu kajian pustaka untuk memperkuat data pustaka yang menjadi landasan bagi penulis dan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, umat Islam berupaya merumuskan cita-cita politik yang diinginkannya. Meskipun dengan segala bentuk keterbatasannya muslim Indonesia mewujudkan keinginannya tersebut guna mengisi kemerdekaan yang berhasil didapatkan dengan susah payah. Salah satu buku yang menjadi acuan skripsi ini adalah buku berjudul *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu* dalam buku ini dijelaskan mengenai sejarah politik Islam Indonesia termasuk sejarah awal dan aspirasi politik.¹⁷

Timbulnya kesadaran dari para pemikir dan pemimpin Islam saat itu tentang pentingnya kekuatan politik dalam suatu tatanan masyarakat merupakan awal dari terbentuknya politik Islam Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta, yang paling mencolok adalah munculnya Masyumi sebagai wadah perjuangan politik Islam. Masyumi menjadi sebuah kekuatan umat muslim dalam bidang politik karena merupakan partai politik yang menaungi berbagai organisasi dan partai politik islam yang lain. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan persatuan umat Islam. Masyumi bukan buatan Jepang seperti tahun 1943 atas ”kebaikan” Jepang di Indonesia.¹⁸

¹⁷Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.15.

¹⁸*Ibid.*, hlm.31.

Buku yang berjudul *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi* dijelaskan mengenai sejarah politik Islam Masyumi beserta induk organisasinya yakni Muhammadiyah.¹⁹ Masyumi berdiri pada 7-8 November 1945 sepenuhnya merupakan hasil karya pemimpin-pemimpin umat Islam yang didirikan di Yogyakarta. Masyumi sebagai kekuatan politik umat Islam tidak hanya bergerak dalam ranah politik saja, melainkan memberi gagasan dan pencetus didirikannya angkatan bersenjata Askar Perang Sabil Yogyakarta. Hal ini terjadi karena keprihatinan para ulama yang tergabung dalam Masyumi terhadap kondisi negara yang semakin kacau, oleh karena itu didirikanlah badan perjuangan semi militer Askar Perang Sabil untuk membantu TNI (Tentara Nasional Indonesia) di medan pertempuran.

Askar Perang Sabil (APS) merupakan organisasi semi militer bentukan muhammadiyah yang anggotanya tergabung dalam Masyumi. Setelah terbentuknya APS maka dibentuk pula Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) yang merupakan wadah bagi para ulama yang tergabung dalam APS. Dalam skripsi yang berjudul *Askar Perang Sabil: Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Republik Indonesia, di DIY 1945-1949* dijelaskan mengenai sejarah APS termasuk awal mula kelahiran angkatan bersenjata ini.

Layaknya sebuah organisasi, APS juga memiliki struktur organisasi dan tujuan yang sama yakni mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan ikut berjuang bersama TNI. Untuk mewujudkan hal tersebut maka MUAPS memiliki peranan penting dalam memobilisasi APS agar berhasil dalam misinya berjuang

¹⁹Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 21.

mempertahankan kemerdekaan. Bentuk organisasi MUAPS adalah organisasi sosial keagamaan yang terdiri atas MUAPS di tingkat pusat, cabang, dan ranting di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰

Adapun peranan para ulama MUAPS dalam memobilisasikan APS adalah dengan pemantapan Ideologi yakni para ulama senantiasa menyerukan semangat *jihad fii sabilillah* sebagai ideologi umat muslim dalam menghadapi penjajah, baik kepada mereka yang telah tergabung dalam pasukan APS maupun kepada masyarakat umum. Setelah dibentuk MUAPS, maka untuk berjuang melawan Belanda segera menyusun kekuatan dengan melakukan pelatihan fisik dan militer untuk para anggota APS yang dilakukan di alun-alun utara Yogyakarta.²¹ Sesuai dengan kesanggupan dari Jenderal Sudirman untuk mengirimkan beberapa pasukannya dengan tujuan memberikan pelatihan dan pembinaan militer kepada pasukan APS. Selain dari TNI, pasukan APS juga mendapatkan pelatihan fisik dan militer dari para sukarelawan mantan anggota Hizbullah.

Pada perkembangannya pelatihan fisik dan militer diadakan di setiap kepanewon (kecamatan) sebelum mereka diberangkatkan ke medan pertempuran. Latihan fisik dan militer ini tentunya menjadi kewajiban yang harus dijalani oleh setiap pasukan APS. Hal ini dikarenakan sebagai sebuah badan kelaskaran yang akan diterjunkan dalam medan juang, mereka harus siap dan mampu untuk menghadapi segala macam gangguan yang berasal dari pihak musuh dan dalam

²⁰Nur'aini Setiawati, "Askar Perang Sabil: Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Republik Indonesia, di DIY 1945-1949", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1988), hlm. 4.

²¹Tashadi (dkk), *op.cit*, hlm. 58.

perjuangannya mempertahankan kemerdekaan APS di bawah komando TNI terlibat dalam berbagai pertempuran melawan berbagai serangan yang mengancam kemerdekaan Indonesia.

Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) mengirimkan pasukan bersenjata Askar Perang Sabil ke front pertempuran. Pada peristiwa Agresi Militer Belanda I, pertama kali APS diterjunkan dalam medan pertempuran ketika dikirim ke sekitar kota Semarang yaitu daerah Mranggen dan Srandol.²² MUAPS mengirimkan satu kompi pasukan bersenjata APS ke daerah Mranggen dengan komandan kompi K.H. Juraimi dengan didampingi K.H. Hadjid sebagai imam. Setelah sampai di Mranggen pasukan APS mengadakan pembagian tugas yakni daerah Mranggen sebelah timur dipimpin oleh K.H. Juraimi. Kemudian untuk wilayah Mranggen sebelah selatan dipimpin oleh komandan Badri.²³

Ketika mengirimkan pasukan APS ke daerah sekitar Semarang, mereka membuat pos pertahanan di daerah Srandol. Dengan konflik fisik Belanda yang semakin memuncak mereka melancarkan serangan ke pos-pos pertahanan bangsa Indonesia. Setelah diketahui adanya pos APS di Srandol maka pasukan Belanda mengadakan serangan dengan terus menerus melepaskan tembakan, pasukan APS tidak mampu menahan serangan tersebut namun berhasil menghindarinya untuk sementara waktu.

²²Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*, (Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra), 1996, hlm.52.

²³Nur'aini Setiawati, *op.cit.*, hlm. 66.

Setelah itu, MUAPS juga mengirim APS ke Kebumen dengan menggunakan kereta api sebagai alat transportasinya. Pengiriman pasukan APS ini didasarkan atas perintah Panglima Besar Jendral Soedirman melalui surat perintah dari Jendral Urip Sumoharjo selaku kepala staf TNI. Selain dari perintah tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menganjurkan pasukan APS bekerja sama dengan Angkatan Oemat Islam (AOI) yang berpusat di Kebumen. Dengan adanya perintah dari Panglima Besar dan anjuran Sri Sultan, MUAPS yang bermarkas di kompleks Masjid Besar Kauman mengirimkan pasukan APS ke daerah Kebumen di bawah komando Sarbini selaku komandan pertempuran.

Keterlibatan APS dalam membantu TNI selanjutnya adalah memberantas PKI di Madiun dan Gunung Kidul, yang pada saat itu PKI Muso berhasil merebut kekuasaan di Madiun dan mendirikan pemerintahan sendiri. Ketika terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1948, para kyai yang sebagian besar telah tergabung dalam APS ini juga selalu berusaha memberikan petunjuk kepada pasukan TNI maupun Pasukan APS sendiri dalam meluncurkan serangannya. Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun bersama dengan TNI dan Polisi, APS dengan gencar melakukan perlawanan dan penumpasan terhadap pasukan PKI di beberapa daerah. Salah satu daerah yang banyak melibatkan peranan pasukan APS dalam usaha penumpasan pemberontakan PKI adalah Gunungkidul. Sebelum terjadinya kontak fisik antara pasukan APS dengan PKI di Gunungkidul, dalam usahanya menumpas pemberontakan PKI, terlebih dahulu pasukan APS dikirim

ke berbagai daerah di sekitar Madiun yang menjadi lokasi awal pemberontakan PKI pada tahun 1948.²⁴

Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan bertindak dan TNI ditugaskan untuk merebut kembali Madiun. Kemudian daerah Gunung Kidul yang merupakan tempat pelarian orang-orang PKI Madiun tidak terhindar dari pertempuran melawan APS. Setelah bergabung dengan TNI dalam menumpas PKI yang merongrong kedaulatan negara Indonesia, peranan APS terlihat pula dalam peristiwa Agresi Militer Belanda II. Melihat kondisi Indonesia yang masih mencekam dengan adanya Partai Komunis Indonesia (PKI), situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda untuk menyerang Indonesia untuk kedua kalinya. Hal ini berawal dari tidak berjalan dengan baiknya perjanjian Linggajati dan Renville.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangannya ke Yogyakarta melalui pasukan lintas udara dan berhasil menduduki lapangan udara Maguwo serta melanjutkan penyerangannya menuju kota Yogyakarta. Melihat kondisi tersebut, ulama Yogyakarta yang tergabung dalam MUAPS segera menyusun kekuatan untuk mengadakan perang gerilya hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas dikeluarkannya Perintah Kilat No. 1/PB/48 oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Isi dari Perintah Kilat tersebut adalah perintah kepada semua jajaran Angkatan Perang Republik Indonesia agar menjalankan perang gerilya sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya serta telah disepakati

²⁴Estu Dwiyo, "Peranan Askar Perang Sabil (APS) Dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm.98.

oleh Jenderal Sudirman sebagai pucuk tertinggi TNI angkatan darat.²⁵ Dalam melaksanakan perintah tersebut seluruh angkatan bersenjata meninggalkan kota dan mengadakan konsolidasi di sekitar kota Yogyakarta. Adapun MUAPS yang bermarkas di Kauman memutuskan pindah ke luar kota setelah sebelumnya mengadakan pembagian tugas. Kemudian daerah Karangajen dipilih sebagai markas APS.²⁶

Pada tanggal 20 Desember 1948 pasukan Belanda melakukan serangan seperti hari sebelumnya dengan kekuatan yang lebih besar mereka menembaki dan menghancurkan beberapa tempat sasarannya. Pasukan Belanda mengadakan aksi pembersihan di kota dan di tiap-tiap kampung. Semua laki-laki dikumpulkan dan para pemuda ditahan. Tindakan pembersihan yang dilakukan pasukan Belanda kemudian ditujukan di tepi-tepi kota, khususnya di Karangajen yang merupakan markas APS.

Tindakan ini menimbulkan kemarahan dari masyarakat dan pasukan APS dan dalam waktu yang singkat mereka mengadakan serangan balasan pada malam hari dengan mengadakan pertahanan disekitar daerah Karangajen. Pertempuran yang dilakukan pada setiap malam hari tersebut dalam minggu pertama setelah Belanda menduduki Yogyakarta ini mengakibatkan gugurnya lima pasukan APS.²⁷

²⁵A.H,Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang Lalu dan yang Akan Datang*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 120-121.

²⁶Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm.59.

²⁷Suratmin, *op.cit.*, hlm. 62.

Kemudian perjuangan APS di bawah komando TNI dilaksanakan di tiap kabupaten di Yogyakarta dengan mengirim pasukan APS ke daerah-daerah tersebut didasarkan pada perintah MUAPS.

F. Historiografi yang Relevan

Penggunaan historiografi yang relevan merupakan suatu hal yang penting. Historiografi adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses. Historiografi yang relevan ini mengacu pada kajian-kajian historis yang mendahului sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Adanya penjelasan mengenai perbedaan penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tentunya sudah cukup untuk menunjukkan orisinalitas karya ilmiah.

Penulis perlu untuk melakukan *review* terhadap karya penelitian sejarah yang lain dengan tema yang relevan, serta akan diketahui apa kekurangan para peneliti terdahulu dan apa yang masih perlu diteliti.²⁸ Berawal dari penjelasan mengenai historiografi yang relevan tersebut, maka penulis menemukan historiografi yang relevan dengan penulisan yang akan diajukan.

Skripsi yang pertama yaitu skripsi Nur'aini Setiawati, mahasiswi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM berjudul *Askar Perang Sabil: Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Kemerdekaan RI di DIY (1945-1949)*. Skripsi ini membahas tentang latar belakang dibentuknya APS sampai pada peranannya pada masa perang kemerdekaan pada tahun 1945-1949. Penelitian yang dilakukan pada tahun

²⁸Tim Prodi Ilmu Sejarah, *op.cit.*, hlm.11.

1988 ini lebih menyoroti APS dari sudut pandang sosio-religius sedangkan penulis menyoroti APS lebih pada peranan politik dan militer religius masa perang kemerdekaan 1945-1949 di Yogyakarta. Terdapat perbedaan pada pembahasan objek penelitian yang tidak sama, yang paling menonjol adalah skripsi ini menyinggung tentang politik Islam khususnya Masyumi yang berperan terhadap terbentuknya APS.

Skripsi selanjutnya karya Maryanti, mahasiswi UNY tahun 2006 yang menulis tentang *Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Perang Kemerdekaan di Yogyakarta (1947-1949)* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY. Dalam skripsi ini dikaji mengenai peranan umum APS masa perang kemerdekaan II di Yogyakarta. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah ruang lingkup waktu yang berbeda. Skripsi ini difokuskan pada peranan APS pada Agresi Belanda II sedangkan skripsi penulis tidak hanya berfokus kepada Agresi Militer Belanda namun juga sebelum peristiwa tersebut sampai akhir perang kemerdekaan tahun 1949.

Skripsi selanjutnya karya Estu Dwiyono, mahasiswa UNY tahun 2012 tentang *Peranan Askar Perang Sabil (APS) dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai peranan APS beserta TNI dalam menumpas pemberontakan PKI khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah objek penelitian yang tidak sama, skripsi ini memfokuskan pembahasannya mengenai peranan APS dalam memberantas PKI. Sedangkan skripsi penulis pembahasannya dimulai dari peristiwa Agresi Militer Belanda I sampai peristiwa

Serangan Oemoem 1 Maret, namun dibahas pula mengenai PKI Madiun dan juga Gunungkidul.

G. Metode Penelitian

Tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah metode penelitian. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, melakukan penelitian secara kritis dalam bentuk lisan.²⁹ Langkah-langkah yang dipakai menggunakan metode sejarah kritis yang proses pengerjaannya melibatkan tahapan tertentu menurut pedoman disiplin sejarah. Data-data yang dikumpulkan kemudian dirangkaikan kedalam hubungan fakta hingga membentuk pengertian-pengertian yang kemudian dituangkan kedalam bentuk penulisan sejarah.

Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian sejarah (Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi), didalamnya juga disinggung mengenai sumber-sumber penelitian.³⁰

Adapun langkah-langkah dalam penelitian sejarah antara lain sebagai berikut.

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata *heuriskein* dalam bahasa Yunani, yang artinya menemukan. Heuristik dilakukan guna mendapatkan data atau materi sejarah.³¹

²⁹Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta:Logos Wacana,1999), hlm. 43.

³⁰Tim Prodi Ilmu Sejarah, *loc.cit*.

³¹Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta:Ombak,2007), hlm.67.

Pencarian dan pengumpulan sumber berkaitan dengan topik yang diteliti. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik/judul penelitian. Untuk melacak sumber tersebut, penulis melakukan kegiatan heuristik baik melalui metode kepustakaan atau arsip nasional.

Heuristik atau pencarian sumber bisa dikatakan sebagai hal pokok yang dibutuhkan untuk membuat suatu karya sejarah. Sumber sejarah ada yang dikategorikan sebagai sumber primer dan sumber sekunder. Tanpa sumber sejarah, kisah masa lalu tidak dapat direkonstruksi oleh sejarawan.³² Adapun sumber tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya atau yang dikenal dengan saksi mata. Dalam penelitian mengenai Askar Perang Sabil (APS) penulis menggunakan sumber primer berupa arsip.

Adapun beberapa arsip yang dipakai dalam melakukan penelitian mengenai Askar Perang Sabil ini adalah sebagai berikut.

Arsip BPAD no.595, *Berisi mengenai Pengumuman Menteri Negara Republik Indonesia Koordinator Keamanan No. 1/7 tahun 1949. Dibuat pada 29 juni 1949 di Yogyakarta oleh Hamengku Buwono ke IX. Dalam rangka mendata organisasi-organisasi perjuangan dan kesatuan bersenjata Republik Indonesia.*

³²Abdur Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*.(Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

Arsip Keraton Yogyakarta, *Serat Kekantjingan* adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai bentuk restunya kepada para ulama yang telah membentuk MUAPS dan izin melakukan i'tikaf munajat di masjid at-taqwa serta memintaberkah atas terbentuknya Laskar Angkatan Perang Sabil.

Arsip kartu anggota pasukan bersenjata Askar Perang Sabil (APS) milik Zahrie Elias. *Berisi surat penetapan sebagai anggota APS di tandatangani oleh imam APS yaitu KH. Machfoedh pada September 1947.*

Arsip Museum Vredeburg, *buku saku anggota Hizbullah* milik K.H Hadjid, 1944.

Selain dari pada sumber arsip, penulis juga melakukan wawancara kepada saksi sejarah maupun keluarga dari anggota Askar Perang Sabil, berhubung para pelaku sejarahnya sudah meninggal dunia. Wawancara kemudian dilakukan dengan menjadikan anggota keluarga anggota APS yang sedikit banyak mengetahui tentang sejarah APS dan badan perjuangannya MUAPS.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah dengan kata lain hanya tahu dari kesaksian orang lain. Sumber sekunder biasanya berupa buku, artikel, koran sejamin, dll. Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber sekunder dalam bentuk buku antara lain sebagai berikut.

Ahmad Adabi Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang, 2000.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Nur'aini Setiawati, "Peranan Angkatan Perang Sabil dan Perjuangan Bersenjata RI", *Inovasi*, tahun 1994.

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1994.

Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1996.

Sutrisno (dkk), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta*, Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah, 1984.

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Tashadi (dkk), *Keterlibatan Ulama DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, Jakarta: CV. Depdiknas, 2000.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan usaha meneliti, melalui deteksi sumber melalui keaslian dan kebenaran sumber guna menemukan fakta sejarah. Sumber yang telah ditemukan melalui tahap heuristik terlebih dahulu dilakukan kritik sumber sebelum digunakan karena tidak semua sumber dapat dipakai dalam penulisan sejarah. Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah.³³ Verifikasi terbagi menjadi dua yakni kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal merupakan kritik sumber yang dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Menurut Kuntowidjoyo tujuan kritik eksternal adalah untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis kertas, tinta, gaya penulisan, bahasa, kalimat, untuk mengetahui keaslian sumber.³⁴

Kritik Internal merupakan pemeriksaan terhadap isi sumber yang bertujuan untuk membuktikan apakah kesaksian dan pernyataan sumber dapat diandalkan

³³*Ibid.*, hlm. 47.

³⁴Kuntowidjoyo, *Penjelasan Sejarah :Historical Explanation*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 101.

atau tidak.³⁵ Kritik eksternal dan internal dilakukan untuk mendapatkan fakta sejarah.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai induk subjektifitas. Menurut Daliman interpretasi adalah menetapkan makna terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi.³⁶ Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah³⁷.

Sejarah sebagai suatu peristiwa yang dapat diungkap kembali oleh para sejarawan melalui berbagai sumber, baik berbentuk data, dokumen perpustakaan, buku, berkunjung kesitus-situs sejarah atau wawancara, sehingga dapat terkumpul dan mendukung dalam proses interpretasi. Jadi interpretasi dapat diartikan sebagai langkah untuk menafsirkan keterangan sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi adalah penulisan sejarah dan merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian sejarah. Sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan atau sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka dilanjutkan dengan menuliskan kisah sejarah. Penulisan sejarah yang dilakukan tentunya disesuaikan

³⁵*Ibid.*, hlm. 135.

³⁶A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta, Ombak, 2012), hlm. 51.

³⁷*Ibid.*, hlm. 50.

dengan pedoman tata tulis ilmiah yang berlaku serta telah disepakati oleh para sejarawan profesional. Adapun bentuk penulisannya bersifat diakronis yaitu menerangkan peristiwa dalam kurun waktu tertentu³⁸. Karya sejarah yang baik memerlukan kemampuan sejarawan untuk menulis peristiwa sejarah dengan sistematis dan relevan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran fakta yang digunakan dalam penelitian sejarah.

H. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian sejarah memerlukan pendekatan multidimensional. Hal ini untuk mengurangi sisi subjektivitas penulis, karena penulis dapat memandang suatu peristiwa sejarah dari berbagai macam sudut pandang. Penulisan skripsi berjudul *Askar Perang Sabil (APS): Studi Politik Dan Militer Religius Masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1945-1949*. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat yang terkait dengan ikatan adat, kebiasaan, kehidupan, tingkah laku, dan keseniannya.³⁹ Pendekatan sosial ini akan dipakai penulis untuk menganalisa kondisi sosial rakyat Yogyakarta masa awal kemerdekaan. Melalui pendekatan ini penulis akan

³⁸Kuntowidjoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 158.

³⁹Hasan Sadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 82.

mengkaji tentang kondisi sosial masyarakat Yogyakarta yang mempengaruhi terbentuknya APS oleh para ulama yang umumnya tokoh APS berasal dari anggota Muhammadiyah. Dengan adanya pendekatan sosial dalam penelitian dapat menjelaskan fenomena sosial dalam kurun waktu tertentu dan pengaruhnya terhadap suatu peristiwa sejarah yang terjadi mengingat manusia sebagai pelaku sejarah.

2. Pendekatan Politik

Pendekatan politik digunakan penulis untuk menjelaskan suatu peristiwa sejarah yang bersifat politik. Dominasi aspek politik dalam sejarah berkaitan dengan penggunaan sumber sejarah. Bila sumber itu berasal dari pemerintah, maka umumnya berupa laporan kegiatan politik dan pemerintahan⁴⁰.

Membahas mengenai Agresi Militer Belanda dan peristiwa perang kemerdekaan 1945-1949 pada umumnya tentu tidak dapat terlepas dari adanya faktor politik, sehingga dalam penelitian ini sangat diperlukan pemakaian pendekatan politik. Terlebih Askar Perang Sabil dalam skripsi penulis sekilas membahas mengenai politik Islam dan juga para ulama yang memiliki peranan dalam pembentukan APS.

Meskipun bukan sebuah organisasi politik namun berdirinya APS tidak terlepas dari pengaruh partai politik Islam Masyumi yang pada waktu itu menggagas pembentukan organisasi semi militer Islam untuk menghadapi musuh yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan perpolitikan bangsa Indonesia.

⁴⁰Abdur Rahman Hamid dan Muhammad Soleh Madjid, *op.cit.*, hlm. 94.

3. Pendekatan Agama

Pendekatan agama dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu komponen yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Askar Perang Sabil. Pendekatan agama merupakan suatu refleksi kritis dan sistematis yang dilakukan oleh penganut agama terhadap agamanya.⁴¹ Suatu refleksi kritis dan sistematis yang dilakukan oleh penganut agama terhadap agamanya.

Mengingat tema yang diangkat dalam skripsi ini adalah peranan sebuah organisasi kelaskaran yang bernafaskan Islam, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sebagai sebuah organisasi semi militer bentukan para ulama dan Masyumi maka APS sangat kental dengan religius Islam karena awal mula didirikannya berdasarkan firman Allah SWT yang berisi tentang seruan berjuang di jalan Allah dan melawan kemungkaran.

4. Pendekatan Militer

Pendekatan militer merupakan kebijakan mengenai persiapan dan pelaksanaan perang yang menentukan baik buruknya serta besar kecilnya potensi dan kekuatan negara, dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik suatu negara.⁴² Mengingat APS termasuk organisasi semi militer Islam yang bekerjasama dengan militer TNI dalam mempertahankan kemerdekaan di Yogyakarta tahun 1945-1949. Pendekatan militer dalam penelitian ini merupakan salah satu unsur penting yang perlu dikaji lebih dalam. Sedangkan mengenai

⁴¹Kevin Barnet, *Pengantar Teologi*. (Jakarta: Gunung Mulia, 1981), hlm.15.

⁴²Sayadiman Suryohadiprojo, *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang: Masalah Pertahanan Negara*. (Jakarta: Intermasa, 1981), hlm. 66.

keterlibatan APS dalam membantu TNI di medan pertempuran terlihat dari perjuangan mereka diberbagai pertempuran yang pernah terjadi khususnya di Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul *Askar Perang Sabil (APS): Studi Politik dan Militer Religius Masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1945-1949* terdiri lima bab pembahasan. Untuk memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis memberikan gambaran singkat dari kelima bab tersebut guna memperjelas tujuan dan informasi dari tulisan ini diberi garis besar sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam skripsi ini menjelaskan mengenai hal yang mendasari dibuatnya penelitian mengenai *Askar Perang Sabil (APS): Studi Politik dan Militer Religius Masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1945-1949*. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian, serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II MENGENAL POLITIK ISLAM MASA AWAL KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA

Bab kedua dibahas sekilas mengenai politik Islam Masyumi yang melatar belakangi dibentuknya Askar Perang Sabil Yogyakarta, meliputi kondisi sosial dan politik Yogyakarta masa awal kemerdekaan, organisasi Muhammadiyah, serta peranan ulama Yogyakarta terhadap dibentuknya Askar Perang Sabil.

BAB III ASKAR PERANG SABIL YOGYAKARTA

Bab ketiga dibahas tentang situasi yang mendorong terbentuknya Askar Perang Sabil dan Markas Ulama Askar Perang Sabil di Yogyakarta, terbentuknya Askar Perang sabil dan juga pembinaan terhadap pasukan APS oleh wadah perjuangannya MUAPS.

BAB IV PERANAN ASKAR PERANG SABIL DALAM MEMBANTU TNI DI MEDAN PERTEMPURAN 1945-1949

Bab ini penulis memaparkan mengenai sepak terjang APS dalam perang kemerdekaan di Yogyakarta tahun 1945-1949, terlibat dalam medan pertempuran berjuang bersama TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia lewat beberapa peristiwa penyerbuan yang sempat terjadi di Yogyakarta.

BAB V KESIMPULAN

Kemudian dalam bab kesimpulan menjelaskan intisari dari penjabaran materi pada bab – bab sebelumnya. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta isi dari semua pokok pembahasan penulisan skripsi yang berjudul *Askar Perang Sabil (APS): Studi Politik dan Militer Religius Masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta Tahun 1945-1949*.